LUMIVERA PUBLISHING GROUP
Illuminating Knowledge, Empowering Research

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

JLPD TALENTA PENDAS

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PRODUK SOSIAL: RELASI KUASA, KONSTRUKSI PENGETAHUAN, DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS PESERTA DIDIK

Muklis Sihombing[1]
Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan[1]

ABSTRACT

Islamic Religious Education (PAI) curriculum is not merely a technical instrument for organizing learning content and activities; it is also a social product shaped by values, interests, policies, scholarly traditions, and power relations. This article analyzes the PAI curriculum from the perspective of the sociology of education by positioning curriculum as a site of knowledge construction, value reproduction, interest negotiation, and student identity formation. The study employs qualitative library research and critical analysis of literature on the sociology of education, curriculum theory, Islamic education, and Indonesian educational policy. The analytical framework draws on Émile Durkheim's view of education's social function, Pierre Bourdieu's concepts of habitus, capital, and social reproduction, Michel Foucault's power-knowledge perspective, and Basil Bernstein's concepts of classification and framing. The findings indicate that the PAI curriculum operates in four major domains: transmission of religious values, legitimation of selected knowledge, formation of habitus and identity, and regulation of relationships among schools, the state, teachers, students, families, and society. The PAI curriculum is therefore not entirely neutral because the selection of content, language, methods, textbooks, and assessment reflects social selection. Nevertheless, curriculum can also become a space for social transformation through critical, contextual, inclusive, and socially responsive education.

Keywords: PAI curriculum; sociology of education; power relations; knowledge construction; habitus; identity.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

ABSTRAK

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya merupakan perangkat teknis untuk mengatur materi dan proses pembelajaran, tetapi juga merupakan produk sosial yang dibentuk oleh nilai, kepentingan, kebijakan, tradisi keilmuan, dan relasi kekuasaan. Artikel ini bertujuan menganalisis kurikulum PAI melalui perspektif sosiologi pendidikan dengan menempatkan kurikulum sebagai arena konstruksi pengetahuan, reproduksi nilai, negosiasi kepentingan, dan pembentukan identitas peserta didik. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis kritis terhadap literatur sosiologi pendidikan, teori kurikulum, pendidikan Islam, serta dokumen kebijakan pendidikan Indonesia. Kerangka analisis memanfaatkan pemikiran Émile Durkheim tentang fungsi sosial pendidikan, Pierre Bourdieu tentang habitus, modal, dan reproduksi sosial, Michel Foucault tentang relasi kuasa-pengetahuan, serta Basil Bernstein tentang klasifikasi dan framing pengetahuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum PAI bekerja pada sedikitnya empat ranah: pewarisan nilai keagamaan, legitimasi pengetahuan tertentu, pembentukan habitus dan identitas, serta pengaturan hubungan antara sekolah, negara, guru, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Kurikulum PAI karena itu tidak sepenuhnya netral; pemilihan materi, bahasa, metode, buku ajar, dan evaluasi mencerminkan proses seleksi sosial. Namun, kurikulum juga dapat menjadi ruang transformasi sosial melalui pendidikan yang kritis, kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artikel ini merekomendasikan pengembangan kurikulum PAI yang tetap berlandaskan tauhid dan nilai Islam, tetapi sekaligus sensitif terhadap keragaman sosial, budaya lokal, perubahan teknologi, ketimpangan pendidikan, serta persoalan sosial kontemporer.

Kata kunci: kurikulum PAI; sosiologi pendidikan; relasi kuasa; konstruksi pengetahuan; habitus; identitas.

JLPD TALENTA PENDAS

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

A. Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya berlangsung di dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya. Sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, guru, peserta didik, keluarga, negara, dan masyarakat merupakan aktor yang saling berhubungan dalam proses pendidikan. Karena itu, pendidikan bukan sekadar aktivitas pedagogis di ruang kelas, tetapi juga proses sosialisasi, pewarisan nilai, pembentukan identitas, reproduksi, sekaligus perubahan struktur sosial. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pertanyaan tentang apa yang diajarkan, siapa yang menentukan materi, bagaimana pengetahuan disampaikan, dan siapa yang memperoleh manfaat dari suatu sistem pendidikan menjadi penting untuk dikaji.

Kurikulum merupakan salah satu instrumen utama yang memperlihatkan hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Secara administratif, kurikulum sering dipahami sebagai seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Namun, dalam perspektif sosiologi kurikulum, kurikulum juga merupakan hasil seleksi sosial atas pengetahuan. Tidak semua pengetahuan dapat masuk ke dalam kurikulum. Ada proses penentuan prioritas, penyusunan hierarki mata pelajaran, pemilihan bahasa, penentuan standar kompetensi, penetapan buku ajar, dan penyusunan sistem evaluasi. Dengan demikian, kurikulum mempunyai dimensi sosial dan politik yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena PAI tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk sikap, moralitas, praktik keberagamaan, dan identitas peserta didik. Materi PAI membawa nilai normatif yang diharapkan menjadi pedoman hidup. Pada saat yang sama, implementasi PAI berlangsung dalam masyarakat yang plural, dinamis, digital, dan mengalami perubahan sosial yang cepat. Oleh sebab itu, kurikulum PAI selalu berhadapan dengan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai Islam diwariskan tanpa kehilangan relevansi sosialnya.

Kajian mutakhir memperlihatkan bahwa kurikulum pendidikan Islam dapat dibaca sebagai ruang transformasi sosial sekaligus ruang pembentukan relasi sosial. Musyarrof dan Kinabalu (2026) menempatkan kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif sosiologi dan menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya mewariskan nilai, tetapi juga menjadi ruang dinamika kekuasaan,

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

interaksi pembelajaran, dan transformasi sosial. Fathihudin, Ramdani, dan Darraz (2026) juga membahas masuknya PAI ke dalam kurikulum sekolah umum dari perspektif sosiologis. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya membaca kurikulum PAI tidak hanya sebagai dokumen pedagogis.

Pada level implementasi, relasi kuasa juga terlihat dalam penerapan kurikulum. Amiroh dan Hanif (2026) menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT dengan menggunakan perspektif relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault dan sosiologi kurikulum. Penelitian tersebut menunjukkan adanya negosiasi otoritas antara kebijakan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Artinya, kurikulum bukan dokumen yang bekerja secara otomatis, melainkan mengalami interpretasi dan negosiasi dalam praktik sosial.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini memfokuskan pembahasan pada tiga pertanyaan: bagaimana kurikulum PAI dapat dipahami sebagai produk sosial; bagaimana relasi kuasa dan konstruksi pengetahuan bekerja dalam kurikulum PAI; dan bagaimana kurikulum PAI dapat diarahkan dari sekadar reproduksi nilai menuju transformasi sosial yang kontekstual. Tujuan artikel adalah menghasilkan kerangka analitis yang dapat digunakan mahasiswa dan praktisi PAI untuk membaca kurikulum secara lebih kritis tanpa melepaskan landasan normatif pendidikan Islam.

JLPD TALENTA PENDAS

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian berupa sumber tertulis yang relevan dengan sosiologi pendidikan, teori kurikulum, pendidikan Islam, relasi kuasa, konstruksi pengetahuan, dan kebijakan pendidikan. Sumber konseptual meliputi karya Durkheim, Bourdieu, Foucault, Bernstein, Apple, serta literatur pendidikan Islam. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, pembacaan, pencatatan, dan kategorisasi literatur. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi dan analisis kritis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi konsep kunci dalam teori sosiologi pendidikan. Tahap kedua

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

adalah memetakan konsep tersebut terhadap karakteristik kurikulum PAI. Tahap ketiga adalah melakukan sintesis untuk merumuskan implikasi bagi pengembangan kurikulum PAI. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, artikel tidak mengklaim hasil wawancara atau observasi lapangan.

C. Kerangka Teoretis Sosiologi Pendidikan dan Kurikulum

3.1 Pendidikan sebagai Proses Sosialisasi

Émile Durkheim memandang pendidikan sebagai proses sosial yang berfungsi membentuk individu agar mampu hidup sebagai anggota masyarakat. Pendidikan mentransmisikan norma, nilai, dan pola perilaku yang diperlukan untuk mempertahankan keteraturan sosial (Durkheim, 1956). Dalam kerangka ini, kurikulum dapat dipahami sebagai sarana institusional untuk melakukan sosialisasi. Materi pelajaran, tata tertib, ritus sekolah, pembagian waktu, dan sistem penghargaan secara bersama-sama membentuk kebiasaan sosial.

Perspektif fungsionalisme membantu menjelaskan mengapa masyarakat membutuhkan kurikulum yang memiliki orientasi nilai. Dalam konteks PAI, fungsi sosialisasi terlihat pada proses pengenalan akidah, ibadah, akhlak, tanggung jawab sosial, dan norma kehidupan. Akan tetapi, pendekatan fungsionalisme perlu dilengkapi dengan teori konflik karena masyarakat tidak selalu sepakat mengenai nilai apa yang harus diwariskan. Perbedaan pandangan tentang materi, metode, orientasi keagamaan, dan tujuan pendidikan menunjukkan adanya proses negosiasi.

Kurikulum dan Reproduksi Sosial

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan dapat menjadi mekanisme reproduksi sosial melalui distribusi modal budaya dan pembentukan habitus. Sekolah cenderung memberi penghargaan terhadap bentuk bahasa, pengetahuan, gaya komunikasi, dan kebiasaan tertentu yang lebih dekat dengan modal budaya kelompok tertentu (Bourdieu & Passeron, 1977). Konsep ini relevan bagi kurikulum PAI karena peserta didik datang dari latar belakang keluarga, pesantren, organisasi keagamaan, daerah, dan kelas sosial yang berbeda.

Habitus merupakan disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan kemudian memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak (Bourdieu, 1990). Dalam PAI,

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

habitus dapat dibentuk melalui pembiasaan shalat, membaca Al-Qur'an, adab, bahasa keagamaan, cara berpakaian, cara berinteraksi, dan praktik pendidikan. Pembentukan habitus merupakan bagian positif dari pendidikan karakter, tetapi perlu disadari bahwa habitus juga memiliki dimensi sosial. Jika kurikulum hanya mengakui satu bentuk ekspresi keagamaan sebagai bentuk yang paling sah, ia berpotensi membuat pengalaman kelompok lain menjadi tidak terlihat.

Relasi Kuasa dan Pengetahuan

Michel Foucault menempatkan pengetahuan dan kekuasaan dalam hubungan yang saling membentuk. Kekuasaan tidak hanya hadir melalui larangan atau perintah, tetapi juga melalui proses menentukan apa yang dianggap benar, normal, sah, dan dapat dikatakan. Dalam pendidikan, kurikulum, buku teks, ujian, klasifikasi kemampuan, sertifikasi, dan prosedur disiplin merupakan mekanisme yang dapat menghasilkan sekaligus menyebarkan pengetahuan tertentu (Foucault, 1977; 1980).

Perspektif ini membantu melihat bahwa ketika suatu materi masuk ke kurikulum PAI, proses tersebut bukan hanya keputusan pedagogis. Ada institusi, ahli, pemerintah, organisasi pendidikan, guru, penerbit, dan masyarakat yang memiliki peran dalam menentukan pengetahuan mana yang memperoleh legitimasi. Relasi kuasa tidak selalu berarti penyalahgunaan. Kekuasaan dapat menghasilkan tata aturan yang memungkinkan pendidikan berjalan. Persoalan sosiologis muncul ketika suatu bentuk pengetahuan menjadi begitu dominan sehingga alternatif penafsiran, pengalaman lokal, atau suara kelompok tertentu tidak memperoleh ruang yang memadai.

Klasifikasi dan Framing Pengetahuan

Basil Bernstein menjelaskan bahwa distribusi pengetahuan dalam pendidikan dipengaruhi oleh klasifikasi dan framing. Klasifikasi berkaitan dengan batas antarjenis pengetahuan, sedangkan framing berkaitan dengan pengaturan komunikasi pedagogis, termasuk siapa yang mengontrol pemilihan, urutan, dan ritme penyampaian pengetahuan (Bernstein, 2000). Konsep ini berguna untuk membaca hubungan antara PAI dan mata pelajaran lain. Jika PAI dipisahkan secara sangat ketat dari ilmu sosial, sains, teknologi, dan persoalan kehidupan, peserta didik dapat mengalami fragmentasi pengetahuan.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

Sebaliknya, integrasi tidak berarti menghilangkan identitas PAI. Integrasi dapat dilakukan dengan mempertahankan landasan keislaman sekaligus membuka dialog dengan ilmu lain. Misalnya, persoalan lingkungan dapat dibahas melalui ayat Al-Qur'an, fikih, etika, sains lingkungan, dan kebijakan publik. Dengan demikian, PAI menjadi mata pelajaran yang mampu menghubungkan nilai dengan realitas.

Kurikulum sebagai Hidden Curriculum

Kurikulum formal bukan satu-satunya kurikulum yang bekerja dalam pendidikan. Ada hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi, yaitu nilai dan kebiasaan yang dipelajari peserta didik melalui struktur sekolah, relasi guru-siswa, budaya lembaga, dan rutinitas sehari-hari (Jackson, 1968). Dalam PAI, hidden curriculum dapat lebih kuat daripada materi tertulis. Guru yang adil, santun, terbuka terhadap pertanyaan, dan konsisten menjalankan nilai agama memberikan pendidikan akhlak secara langsung.

Sebaliknya, apabila sekolah mengajarkan keadilan tetapi menerapkan perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, atau mengajarkan toleransi tetapi budaya sekolah menutup ruang dialog, peserta didik menerima pesan yang bertentangan dengan kurikulum formal. Karena itu, analisis sosiologis kurikulum PAI harus memperhatikan bukan hanya dokumen, tetapi juga budaya dan praktik lembaga.

JLPD TALENTA PENDAS

Kurikulum PAI sebagai Produk Sosial

Seleksi Pengetahuan Keagamaan

Kurikulum PAI selalu melakukan seleksi. Ruang belajar terbatas, sehingga tidak semua cabang ilmu Islam dapat diberikan dengan kedalaman yang sama. Pemilihan materi akidah, Al-Qur'an-Hadis, fikih, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan tema kontemporer merupakan hasil pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa tujuan pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik, tradisi keilmuan, kebijakan pemerintah, dan pandangan masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, seleksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengetahuan yang diajarkan di sekolah merupakan pengetahuan yang telah dilegitimasi. Karena itu, pengembang kurikulum perlu mengajukan pertanyaan kritis: pengetahuan siapa yang

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

diprioritaskan, pengalaman siapa yang diwakili, perspektif apa yang tidak terlihat, dan kebutuhan sosial apa yang belum mendapatkan ruang? Pertanyaan tersebut bukan untuk merelatifkan kebenaran agama, melainkan untuk memastikan bahwa penyajian pendidikan agama mampu membentuk peserta didik yang memahami nilai sekaligus realitas.

Negara, Kebijakan, dan Standarisasi

Negara mempunyai posisi penting dalam menentukan arah pendidikan melalui regulasi, standar nasional, kurikulum, asesmen, dan mekanisme akreditasi. Dalam pendidikan Islam, hubungan negara dan lembaga pendidikan juga dipengaruhi sejarah panjang integrasi madrasah dan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional. Kajian terbaru mengenai relasi kekuasaan dan kebijakan pendidikan madrasah menunjukkan bahwa kebijakan dapat menjadi instrumen yang menentukan struktur, arah, dan orientasi lembaga pendidikan Islam.

Standarisasi memiliki manfaat karena menjamin hak peserta didik terhadap mutu dan kompetensi minimum. Namun, standarisasi juga memerlukan ruang adaptasi. Masyarakat Indonesia sangat beragam, sehingga kurikulum yang terlalu seragam dapat mengurangi kemampuan lembaga untuk merespons konteks lokal. Karena itu, hubungan antara standar nasional dan otonomi pedagogis perlu dirancang secara proporsional.

Guru sebagai Mediator Kurikulum

Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum. Guru merupakan mediator yang menerjemahkan dokumen kurikulum menjadi pengalaman belajar. Pada tahap inilah kurikulum mengalami interpretasi. Dua guru yang menggunakan dokumen kurikulum yang sama dapat menghasilkan pengalaman belajar yang berbeda karena perbedaan habitus, kompetensi, pengalaman, keyakinan pedagogis, dan konteks kelas.

Dalam pembelajaran PAI, guru mempunyai peran penting dalam memilih contoh, menentukan pertanyaan, mengatur diskusi, memberikan umpan balik, dan menghubungkan materi dengan realitas. Karena itu, penguatan kompetensi guru tidak hanya berupa kemampuan teknis menyusun modul ajar, tetapi juga literasi sosial, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman terhadap keragaman peserta didik.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

Peserta Didik sebagai Subjek Sosial

Peserta didik sering diposisikan sebagai penerima kurikulum. Perspektif sosiologi pendidikan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya merupakan subjek sosial yang membawa pengalaman keluarga, budaya, media sosial, komunitas, bahasa, dan lingkungan pergaulan ke dalam kelas. Artinya, proses pembelajaran selalu merupakan pertemuan antara kurikulum resmi dan pengalaman sosial peserta didik.

PAI akan lebih bermakna apabila guru mampu menghubungkan nilai agama dengan persoalan nyata yang dihadapi peserta didik. Tema kejujuran dapat dikaitkan dengan plagiarisme dan integritas digital. Tema amanah dapat dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Tema ukhuwah dapat dikaitkan dengan budaya perundungan. Tema fikih muamalah dapat dikaitkan dengan transaksi digital. Pendekatan ini membuat PAI menjadi pendidikan yang hidup dalam realitas sosial.

Relasi Kuasa dalam Implementasi Kurikulum PAI

Relasi kuasa dalam pendidikan berlangsung pada berbagai tingkat. Pada tingkat makro, negara menentukan kerangka regulasi. Pada tingkat meso, sekolah atau madrasah menentukan budaya dan kebijakan internal. Pada tingkat mikro, guru dan peserta didik bernegosiasi dalam proses pembelajaran. Keluarga dan masyarakat juga memberikan tekanan dan dukungan terhadap arah pendidikan.

Dalam perspektif Foucault, relasi tersebut dapat dilihat melalui mekanisme disiplin dan normalisasi. Jadwal, presensi, ujian, peringkat, aturan seragam, tata tertib, serta kategori 'siswa baik' dan 'siswa bermasalah' merupakan mekanisme yang membentuk perilaku. Dalam PAI, mekanisme tersebut dapat membantu pembiasaan disiplin ibadah, tetapi perlu dijaga agar pendidikan tidak berubah menjadi kepatuhan mekanis tanpa kesadaran.

Kajian tentang Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT menunjukkan bahwa implementasi kurikulum melibatkan negosiasi otoritas antara kebijakan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Temuan tersebut menguatkan argumentasi bahwa kurikulum merupakan praktik sosial yang terus dinegosiasikan, bukan sekadar dokumen yang tinggal diterapkan.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

Kurikulum PAI dan Pembentukan Identitas

Pendidikan agama memiliki hubungan erat dengan pembentukan identitas. Identitas keagamaan peserta didik dibentuk melalui pengetahuan, ritual, bahasa, simbol, relasi sosial, dan pengalaman pendidikan. Kurikulum PAI menyediakan narasi mengenai siapa manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan sesama, dan bagaimana kehidupan yang baik seharusnya dijalani.

Pembentukan identitas tersebut perlu dipahami secara dinamis. Peserta didik tidak hanya menerima identitas dari sekolah, tetapi juga menegosiasikannya melalui keluarga, teman sebaya, media sosial, organisasi, dan pengalaman hidup. Karena itu, PAI perlu membentuk identitas Muslim yang kokoh secara akidah sekaligus matang secara sosial: mampu berdialog, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, kritis terhadap informasi, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Dalam perspektif Bourdieu, pendidikan membentuk habitus melalui pengulangan praktik. Hal ini memberikan peluang besar bagi PAI. Jika sekolah membangun budaya jujur, disiplin, gotong royong, peduli lingkungan, dan menghargai ilmu, nilai tersebut dapat menjadi disposisi yang melekat. Namun, pembentukan habitus harus disertai pemahaman agar peserta didik tidak hanya mengikuti aturan, tetapi mampu menjelaskan alasan moral dan keagamaannya.

JLPD TALENTA PENDAS

PAI, Perubahan Sosial, dan Transformasi Kurikulum

Perubahan sosial menuntut kurikulum untuk beradaptasi. Perubahan teknologi digital, transformasi keluarga, perkembangan ekonomi platform, perubahan pola komunikasi, krisis lingkungan, dan meningkatnya kompleksitas informasi mengubah kebutuhan peserta didik. Kurikulum PAI yang hanya mengulang bentuk materi lama tanpa kontekstualisasi berisiko kehilangan daya jawab terhadap persoalan baru.

Namun, adaptasi tidak berarti meninggalkan prinsip. Pendidikan Islam memiliki prinsip dasar yang kokoh, seperti tauhid, akhlak, keadilan, amanah, maslahat, tanggung jawab, dan pencarian ilmu. Yang berubah adalah konteks penerapannya. Dengan kerangka ini, transformasi kurikulum dapat dilakukan dengan membedakan antara nilai dasar dan bentuk implementasi.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

Kajian terbaru mengenai landasan pengembangan kurikulum PAI menegaskan pentingnya landasan sosiologis agar kurikulum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial, di samping landasan filosofis, psikologis, dan yuridis.

Rekonstruksi Kurikulum PAI Berbasis Sosiologi Pendidikan

Dari Transfer Pengetahuan menuju Transformasi

Rekonstruksi kurikulum PAI perlu menggeser fokus dari transfer pengetahuan menuju transformasi pengetahuan menjadi kesadaran dan tindakan. Pengetahuan agama harus memiliki hubungan dengan masalah sosial. Pembelajaran akhlak, misalnya, tidak berhenti pada definisi sabar, amanah, adil, dan toleransi, tetapi mengajak peserta didik menganalisis konflik sosial, perundungan, ketidakadilan, hoaks, dan krisis lingkungan.

Penguatan Konteks Lokal

Kurikulum nasional perlu memberi ruang bagi konteks lokal. Pendidikan Islam di daerah pesisir menghadapi persoalan berbeda dengan daerah pertanian atau perkotaan. Pesantren di daerah dengan tradisi keagamaan kuat memiliki kebutuhan berbeda dari sekolah Islam perkotaan. Penguatan konteks lokal dapat dilakukan melalui muatan lokal, proyek sosial, studi kasus, dan pengembangan bahan ajar oleh guru.

JLPD TALENTA PENDAS

Integrasi Ilmu dan Realitas Sosial

Kurikulum PAI dapat dikembangkan secara integratif tanpa menghilangkan batas metodologis antarilmu. Persoalan kemiskinan dapat dibahas melalui zakat, ekonomi, sosiologi, dan kebijakan sosial. Persoalan lingkungan dapat dibahas melalui ayat Al-Qur'an, fikih, sains, dan kebijakan publik. Persoalan kecerdasan buatan dapat dibahas melalui etika Islam, filsafat ilmu, teknologi, dan literasi digital. Pendekatan ini membuat PAI lebih relevan dengan kehidupan peserta didik.

Kurikulum Inklusif dan Dialogis

Kurikulum PAI perlu membangun kemampuan dialogis. Pendidikan agama yang kuat tidak harus berarti pendidikan yang tertutup. Penguasaan nilai keislaman dapat menjadi dasar untuk

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

berdialog secara beradab. Peserta didik perlu dilatih membedakan antara prinsip fundamental dengan persoalan yang memiliki ruang perbedaan pendapat. Ini penting untuk membangun kematangan berpikir dan mencegah simplifikasi terhadap persoalan sosial.

Reformasi Evaluasi

Evaluasi PAI perlu mengukur bukan hanya kemampuan mengingat materi, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, merefleksikan, dan mempraktikkan nilai. Penilaian autentik dapat digunakan melalui proyek, portofolio, studi kasus, jurnal reflektif, observasi akhlak, dan presentasi. Reformasi evaluasi penting karena apa yang diukur oleh sekolah cenderung menjadi apa yang dianggap penting oleh peserta didik.

Implikasi bagi Guru dan Lembaga Pendidikan Islam

Pertama, guru PAI perlu memiliki kompetensi sosiologis. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan membaca latar sosial peserta didik, memahami perubahan masyarakat, mengenali ketimpangan akses pendidikan, dan mengidentifikasi pengaruh media digital. Guru yang memahami konteks sosial akan lebih mampu memilih pendekatan pembelajaran yang tepat.

Kedua, lembaga pendidikan perlu menjadikan budaya sekolah sebagai bagian dari kurikulum. Nilai PAI harus terlihat dalam cara sekolah mengelola konflik, memperlakukan peserta didik, memberikan penghargaan, mengelola lingkungan, dan berhubungan dengan orang tua. Dengan demikian, kurikulum formal dan hidden curriculum tidak saling bertentangan.

Ketiga, pengembang kurikulum perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Guru, peserta didik, orang tua, ulama, akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat dapat memberikan perspektif yang berbeda. Partisipasi tersebut dapat mengurangi jarak antara kurikulum resmi dan kebutuhan sosial.

Keempat, pengembangan kurikulum perlu didukung evaluasi berkala. Perubahan sosial berlangsung cepat, sehingga kurikulum tidak seharusnya diperlakukan sebagai dokumen yang selesai sekali untuk selamanya. Evaluasi dapat dilakukan melalui data pembelajaran, umpan balik guru dan siswa, perkembangan sosial, serta kajian akademik.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

Model Sosiologis Kurikulum PAI

Berdasarkan sintesis teori dan literatur, model sosiologis kurikulum PAI dapat dirumuskan melalui lima komponen yang saling berhubungan: struktur sosial, proses seleksi pengetahuan, relasi kuasa, praktik pedagogis, dan dampak sosial. Struktur sosial mencakup negara, masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan. Struktur tersebut memengaruhi proses seleksi pengetahuan yang kemudian dilegitimasi dalam kurikulum.

Relasi kuasa bekerja dalam menentukan siapa yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Setelah kurikulum ditetapkan, guru menerjemahkannya melalui praktik pedagogis. Praktik tersebut membentuk pengetahuan, habitus, identitas, dan perilaku peserta didik. Hasil akhirnya dapat berupa reproduksi sosial atau transformasi sosial, tergantung bagaimana kurikulum dirancang dan diimplementasikan.

Komponen	Pertanyaan Sosiologis	Aktor Utama	Implikasi bagi PAI
Struktur sosial	Nilai dan kebutuhan sosial apa yang memengaruhi pendidikan?	Negara, keluarga, masyarakat, lembaga	Kontekstualisasi kurikulum
Seleksi pengetahuan	Pengetahuan apa yang dianggap penting dan sah?	Pengembang kurikulum, ahli, pemerintah	Keseimbangan materi dan perspektif
Relasi kuasa	Siapa yang menentukan dan mengontrol pendidikan?	Negara, sekolah, guru, orang tua	Partisipasi dan transparansi
Praktik pedagogis	Bagaimana kurikulum diterjemahkan di kelas?	Guru dan peserta didik	Pembelajaran dialogis dan kontekstual
Dampak sosial	Apa yang direproduksi atau diubah oleh pendidikan?	Peserta didik dan masyarakat	Karakter, identitas, transformasi sosial

Model tersebut dapat diringkas sebagai: Struktur Sosial → Seleksi Pengetahuan → Relasi Kuasa → Praktik Pedagogis → Habitus/Identitas → Reproduksi atau Transformasi Sosial. Model ini menegaskan bahwa perubahan kurikulum tidak cukup dilakukan dengan mengganti dokumen. Perubahan harus menyentuh relasi sosial yang memungkinkan kurikulum bekerja.

Talenta Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 03, September 2026

Pembahasan Kritis

Membaca kurikulum PAI secara sosiologis tidak berarti menempatkan agama sebagai produk kekuasaan semata. Ada bahaya reduksionisme apabila seluruh pengetahuan agama dijelaskan hanya sebagai hasil kepentingan sosial. Islam mempunyai sumber normatif yang menjadi rujukan utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta tradisi keilmuan yang dikembangkan melalui berbagai disiplin. Perspektif sosiologi lebih tepat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tersebut dipilih, dikemas, diajarkan, dilegitimasi, dan diterima dalam konteks sosial tertentu.

Pada sisi lain, pendekatan normatif juga tidak boleh menutup mata terhadap realitas sosial. Nilai Islam harus hadir dalam kehidupan nyata. Jika kurikulum PAI tidak memberi ruang terhadap persoalan kemiskinan, ketimpangan, lingkungan, teknologi, kesehatan sosial, dan perubahan budaya, peserta didik dapat mengalami jarak antara agama yang dipelajari dan kehidupan yang dijalani. Karena itu, pendekatan normatif dan sosiologis seharusnya saling melengkapi.

Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. Pendidikan membutuhkan kontinuitas nilai agar identitas tidak kehilangan akar, tetapi juga membutuhkan inovasi agar mampu merespons perubahan. Di sinilah konsep transformasi kurikulum menjadi penting: bukan mengganti nilai dasar, melainkan menerjemahkan nilai tersebut ke dalam persoalan dan kebutuhan baru.

JLPD TALENTA PENDAS

D. Kesimpulan

Kurikulum PAI dapat dipahami sebagai produk sosial karena pembentukannya dipengaruhi oleh struktur masyarakat, kebijakan negara, tradisi keilmuan, kebutuhan peserta didik, budaya lembaga, dan relasi antaraktor pendidikan. Kurikulum tidak hanya menentukan apa yang dipelajari, tetapi juga membentuk cara peserta didik memahami diri, agama, masyarakat, dan realitas. Perspektif Durkheim menjelaskan fungsi sosialisasi pendidikan; Bourdieu membantu membaca habitus dan reproduksi sosial; Foucault membuka analisis tentang relasi kuasa-pengetahuan; sedangkan Bernstein membantu melihat bagaimana pengetahuan diklasifikasikan dan dikomunikasikan.

Dalam konteks PAI, relasi kuasa hadir dalam proses penentuan materi, kebijakan, buku ajar, standar evaluasi, praktik guru, dan budaya lembaga. Namun, kurikulum tidak harus berakhir sebagai alat reproduksi. Ia dapat menjadi ruang transformasi sosial apabila dikembangkan secara kritis, kontekstual, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kurikulum PAI yang transformatif tetap berlandaskan tauhid dan nilai Islam, tetapi mampu berdialog dengan perubahan sosial, teknologi, keragaman budaya, dan problem kehidupan kontemporer.

Implikasinya, pengembangan kurikulum PAI perlu memperkuat konteks lokal, integrasi ilmu, partisipasi pemangku kepentingan, kompetensi sosiologis guru, evaluasi autentik, dan keselarasan antara kurikulum formal dengan hidden curriculum. Dengan demikian, PAI dapat berfungsi bukan hanya sebagai sarana pewarisan pengetahuan agama, tetapi sebagai kekuatan pendidikan yang membentuk manusia beriman, berakhlak, kritis, adaptif, dan mampu berkontribusi terhadap transformasi masyarakat.

Daftar Pustaka

Afifah, N., & Marwiji, M. H. (2025). Landasan sosiokultural dalam pengembangan kurikulum PAI pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits MTs. Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 4(2). https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i2.110

Al-Iman. (2026). Landasan-landasan perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 10(1).

Amiroh, A. A., & Hanif, M. (2026). Dinamika sosial dan relasi kuasa dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, 3(10), 1484–1496.

Apple, M. W. (2004). Ideology and Curriculum (3rd ed.). Routledge.

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique. Rowman & Littlefield.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. Sage.

Durkheim, É. (1956). Education and Sociology. Free Press.

Fathihudin, M., Ramdani, D., & Darraz, M. A. (2026). Tinjauan sosiologis tentang masuknya PAI ke dalam kurikulum sekolah umum. An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan.

Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Pantheon Books.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977. Pantheon Books.

Jackson, P. W. (1968). Life in Classrooms. Holt, Rinehart and Winston.

Khotimah, P. H., Rahmadianti, R. W., Purwaningrum, S., & Muawanah. (2026). Relasi kekuasaan dan kebijakan pendidikan dalam perkembangan madrasah di Indonesia. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 4(3). https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i3.8774

Musyarrof, R., & Kinabalu, N. A. (2026). Tinjauan sosiologis tentang kurikulum pendidikan Islam. An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan.

Silpa, Pahrudin, A., Jarmiko, A., & Koderi. (2025). Implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4). https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36213

Tasyono, Rini, A. K., & Najib, N. A. (2025). Peran kurikulum PAI dalam membentuk kesadaran beragama peserta didik. Jurnal Ilmu Tarbiyah, 4(1). https://doi.org/10.566237/jit.v4i1.154

JLPD TALENTA PENDAS